

## ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN BONE, SULAWESI SELATAN

ANDI HASBI, MUH. ZAINUDDIN BADOLLAHI

Politeknik Pariwisata Makassar  
Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar  
Corresponding email: [andihaspoke@poltekmakassar.as.id](mailto:andihaspoke@poltekmakassar.as.id)

### ABSTRACT

*The tourism sector is indeed quite promising to help increase foreign exchange reserves and pragmatically also able to increase people's incomes, sustainable tourism development is defined as a tourism development process oriented to the preservation of resources needed for future development where the surrounding community acts as a provider of tourist needs services. Humanitarian factors and local cultural entities should not be ignored, meaning that community life should not be uprooted from its cultural roots only because of the commercial emphasis of tourism, the lifestyle and culture of local communities, so researchers want to see how the role of community and government participation in development tourism as a leading destination and how tourism development is realized as a superior destination.*

**Keywords:** Community Participation, Government, Tourism Sector

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang menjadi andalan sumber penerimaan devisa bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai hal tersebut dilandasi oleh berbagai faktor yang menunjukkan dimana pertumbuhan dan pergerakan manusia memperlihatkan trend positif yang terus berkembang seiring dengan perbaikan ekonomi pada berbagai negara serta kebutuhan manusia yang sangat hakiki untuk mengenal lebih banyak tentang keindahan dan pesona alam serta budaya masyarakat di berbagai negara.

Paradigma pembangunan di banyak negara kini lebih berorientasi kepada pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah industri pariwisata. Demikian juga halnya yang berlangsung di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir, aktivitas sektor pariwisata telah didorong dan ditanggapi secara positif oleh pemerintah

dengan harapan dapat menggantikan sektor migas yang selama ini menjadi primadona dalam penerimaan devisa negara.

Implementasi pembangunan berkelanjutan juga menyentuh bidang kepariwisataan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masa mendatang, pengertian pembangunan pariwisata berkelanjutan ini pula diartikan 'Form of tourism that are consistent with natural, social, and community values and which allow both hosts and guest to enjoy positive and worthwhile interaction and shared experiences. Penekanan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya pada ekologi dan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan kebudayaan karena kebudayaan juga merupakan sumber daya penting dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam laporan World Commission on Environment and Development (WCED), 1987) disebutkan bahwa "Sustainable Development is Development that meets the needs of present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs". Demikian pula WTO (1993), mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup: (1) *Ecological sustainability*; (2) *Social and Culture sustainability*; dan (3) *Economic sustainability*, baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang.

Interaksi dan perubahan sosial pariwisata secara sosiologis terdiri atas tiga interaksi yaitu interaksi bisnis, interaksi politik dan interaksi kultural, Interaksi bisnis adalah interaksi di mana kegiatan ekonomi yang menjadi basis materialnya dan

ukuran-ukuran yang digunakannya adalah ukuran-ukuran yang bersifat ekonomi. Interaksi politik adalah interaksi di mana hubungan budaya dapat membuat ketergantungan dari satu budaya terhadap budaya lain atau dengan kata lain dapat menimbulkan ketergantungan suatu bangsa terhadap bangsa lain yang dipicu oleh kegiatan persentuhan aktivitas pariwisata dengan aktivitas eksistensial sebuah negara. Sedangkan interaksi kultural adalah suatu bentuk hubungan di mana basis sosial budaya yang menjadi modalnya.

Dalam dimensi interaksi kultural dimungkinkan adanya pertemuan antara dua atau lebih warga dari pendukung unsur kebudayaan yang berbeda. Pertemuan ini mengakibatkan saling sentuh, saling pengaruh dan saling memperkuat sehingga bisa terbentuk suatu kebudayaan baru tanpa mengabaikan keberadaan interaksi bisnis dan interaksi politik. Berangkat dari pemahaman bahwa model yang digunakan untuk pengembangan pariwisata adalah model terbuka maka berarti tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kontak antara aktivitas kepariwisataan dengan aktivitas masyarakat sekitar kawasan wisata. Kontak-kontak ini tidak bisa dibatasi oleh kekuatan apapun apalagi ditunjang dengan adanya sarana pendukung yang memungkinkan mobilitas masyarakat. Kontak yang paling mungkin terjadi adalah kontak antara masyarakat sekitar dengan pengunjung atau wisatawan.

Masyarakat sekitar berperan sebagai penyedia jasa kebutuhan wisatawan. Kontak ini apabila terjadi secara passif akan mengakibatkan keterpengaruhannya pada perilaku, pola hidup dan budaya masyarakat setempat. Menurut Soekandar Wiraatmaja (1972) yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan proses-proses sosial atau mengenai susunan masyarakat. Sedangkan perubahan budaya lebih luas dan mencakup segala segi kebudayaan, seperti kepercayaan, pengetahuan, bahasa, teknologi, dsb. Perubahan dipermudah dengan adanya kontak dengan lain-lain kebudayaan yang akhirnya akan terjadi difusi (percampuran budaya). Kita lihat misalnya bagaimana terjadinya pergeseran kultur kehidupan masyarakat sekitar kawasan Candi Borobudur yang semula berbasis dengan aktivitas kehidupan agraris (bertani) bergeser menjadi masyarakat pedagang dan penjual jasa.

Ketahanan sosial sudah sedikit banyak telah terjadi pergeseran budaya dan tatanan sosial di masyarakat sekitar kawasan wisata. Artinya budaya-budaya lama itu mengalami proses adaptasi yang diakibatkan oleh adanya interaksi dengan para pelancong tersebut. Hal itu dimungkinkan juga karena sifat dari budaya itu sendiri yang dinamis terhadap perubahan yang terjadi. Pariwisata dengan segala aktivitasnya memang telah mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perubahan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Hal itu menuntut adanya perhatian yang lebih dari para pembuat kebijakan sektor pariwisata (pemerintah) untuk mempertimbangkan kembali pola pengembangan pariwisata agar masyarakat sekitar lebih dapat merasakan manfaatnya.

Dengan kata lain bagaimana membuat pengembangan pariwisata yang mampu membuka peluang pelibatan aktif masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan industri pariwisata bukan hanya sekedar sebagai obyek. Sekaligus menjadi catatan, bahwa faktor kemanusiaan dan entitas budaya lokal tidak boleh diabaikan, artinya kehidupan masyarakat tidak boleh tercerabut dari akar budayanya hanya karena adanya penekanan segi komersial dari tourism. Pun juga, jangan sampai penekanan pada aspek ekonomi mengabaikan dimensi lain seperti dimensi ketahanan sosial budaya, karena perkembangan mutakhir dari dunia kepariwisataan adalah beralihnya minat wisatawan dari massive tourism ke ethnic tourism, wisata-wisata unik yang sangat peduli pada karakter asli masyarakat setempat.

### RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan partisipasi masyarakat dan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata sebagai destinasi unggulan dan bagaimana pengembangan pariwisata diwujudkan sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bone?

### TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagai destinasi unggulan, menganalisis peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata

sebagai destinasi unggulan dan untuk menganalisis pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone diwujudkan sebagai destinasi unggulan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata “Pari” yang berarti berkeliling dan kata “Wisata” berarti perjalanan (Yoeti, 1997). Pariwisata secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu perjalanan keliling (*from one place to another place*). Pada prinsipnya pariwisata merupakan kegiatan/aktivitas perjalanan yang dilakukan seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu dengan mengunjungi suatu daerah atau tempat. Kepariwisataan menurut TAP MPRS Tahun 1960 adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberikan hiburan rohani dan jasmani, setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-lihat daerah lain (wisatawan nusantara) atau negara lain (wisatawan manca negara).

Dalam Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1967 ditegaskan bahwa kepariwisataan merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, panorama atau pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman. Adapun definisi kepariwisataan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, yang mengandung unsur manusia (wisatawan), kegiatan (perjalanan), usaha, pengaturan, pembinaan, motivasi (menikmati), sasaran, penyelenggaraan, dan pengendalian.

Dalam PP No.18 Tahun 1994, pariwisata alam didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Menurut Ditjen PHKA (2006), kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Maksud memiliki atraksi wisata adalah bahwa sumberdaya tersebut dapat membuat orang tertarik, sehingga menimbulkan minat untuk berkunjung ke daerah tempat sumberdaya itu berada. Adapun yang dimaksud dengan

sumberdaya dapat menampung kegiatan wisata adalah untuk melihat daya dukung sumberdaya tersebut terhadap aktivitas pariwisata yang dilaksanakan dan jenis wisata yang cocok dengan kondisi sumberdaya yang ada.

### Konsep pengembangan pariwisata

Perkembangan pariwisata Indonesia tidak dapat dilepaskan dari para eksplorasi yang datang dari negara-negara Eropa maupun Asia Timur seperti China dan Asia Selatan yaitu para pendatang dari Gujarat. Pada akhir abad ke-15 telah banyak petualang dari bangsa Eropa dan juga pendatang China seperti Bon An, Bin Ang Den. Kedatangan mereka ke Indonesia terkait dengan keinginan untuk mendapatkan *status* dengan misi serba guna antara lain berdagang, mencari daerah baru dan penyiaran agama. (Mathew, 1978 : 87).

Apabila pendatang dari timur ingin beradaptasi dengan masyarakat setempat tetapi pendatang dari Eropa ingin menguasai wilayah. Hal ini terjadi dan tidak terlepas dari adanya persaingan antar negara Eropa untuk mendapatkan daerah penghasil komoditas perdagangan yang laku dijual di Eropa. Banyak eksplorasi dari Eropa yang mengunjungi Indonesia seperti Marco Polo, Wallacea, Weber, Unghuhn, Van Steiner dan Raffles yang kemudian sangat terkenal karena keinginannya untuk membangun Kebun Raya di Indonesia (Butler, 1999 : 68)

Seperti telah disinggung diatas bahwa kepariwisataan nasional tidak dapat dilepaskan dari Bali. Kepariwisataan di Bali dimulai sejak adanya pengembangan aktivitas Biro Perjalanan Wisata yang berkantor di Batavia. Semula biro ini hanya di Jawa aktivitasnya, tetapi pada tahun 1914 dikembangkan hingga Bali. Perusahaan Pelayaran KPM (*Royal Packet Navigation Company*) melaksanakan pelayaran kapal uap dengan route Batavia-Surabaya ke Makasar dan Bali Fasilitas pos telekomunikasi dan transportasi yang kemudian digunakan untuk fasilitas pariwisata, dibangun pertama kali oleh Belanda di Jawa yaitu Kantor Pos pada tahun 1862. Fasilitas telepon Semarang-Batavia diresmikan pada tahun 1864. Meskipun ketiga fasilitas tersebut pertama dibangun semata-mata bukan untuk pariwisata, tetapi fasilitas ini merupakan bagian penting dari sektor pariwisata. Pertama kali wisatawan menginjakkan kaki di Bali adalah rombongan wisatawan kapal pesiar

*Cruise* di pelabuhan Padang Bali di Buleleng pada 1914, (Fandeli, 2002).

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dibidang pariwisata selain promosi, pengembangan pariwisata, yang tidak kalah penting adalah pengawasan yang kesemuanya dituangkan dalam suatu kebijakan tanpa menghambat inisiatif swasta, karena penyelenggaraan kepariwisataan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial budaya, politik maupun lingkungan hidup.

Undang Undang Kepariwisataan NO 10 Tahun 2009, dalam ketentuan umum telah jelas diungkapkan bahwa

*"Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan sifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha"*

Kebijakan publik dibidang pariwisata merupakan hal yang sedikit rumit dalam fokus penelitian karena sifatnya yang kompleks dan proses yang tidak tetap serta datang dari beragam profesi. Mayoritas rekomendasi kebijakan dan pengambilan keputusan dari literatur yang ada memanfaatkan model perspektif yang mempertunjukkan bagaimana kebijakan pariwisata dan pengambilan keputusan harus dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi sebelum penetapan standar..

Penjelasan diatas mengungkapkan bahwa didalamnya ada pariwisata yang membawa dampak ganda (multiplayer effect) terhadap kehidupan masyarakat apabila pariwisata dikembangkan dengan terencana, terarah dan berkelanjutan. Instrumen pendekatan pengembangan yang signifikan adalah bentuk manajemen kolaborasi, ditunjukkan bahwa kebijakan strategi pengembangan ekonomi, dalam merumuskan kebijakan keterlibatan kedua belah pihak yakni instrumen kebijakan dan berbagai asosiasi pariwisata dan yang terkait.

### **Partisipasi Masyarakat**

Menurut Suradisastra (1995) *dalam* Pramusanti

(2001), definisi partisipasi masyarakat adalah mengikutsertakan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Cernea (1988) menyatakan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal dapat diperoleh hanya dengan memahami struktur masyarakat setempat dengan kebutuhannya, berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan kebutuhan-kebutuhannya, berkomunikasi dengan masyarakat setempat tentang teknik-teknik yang dipakai, dan menjelaskan arti suatu program atau proyek dan jalan yang ditempuh bila berhadapan dengan masyarakat lokal dalam mencapai kesepakatan suatu program. Uphoff (1980) *dalam* Cernea (1988) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu proses kegiatan proyek. Unsur-unsur penting dari partisipasi yaitu: partisipasi dalam membuat keputusan, pelaksanaan, mobilisasi sumberdaya, pemanfaatan bersama dan evaluasi. Partisipasi masyarakat setempat dalam semua proyek tergolong total.

Partisipasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation*, berarti pengmabilan bagian, pengikut sertaan (Echols, 1992). Sedangkan menurut atau dalam bahasa Indonesia, partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Menurut ahli ekonomi, (Mabyarto (1984) yang dikutip oleh Nurtjahyo (1984) dalam Ira zuraida; 18) partisipasi secara umum berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Saat ini pergerakan untuk berusaha dibidang kepariwisataan semakin berkemangan. Hal ini ditandai dengan adanya gerakan untuk membangun objek wisata dapat dilaksanakan oleh pemerintah swasta (pengusaha) maupun masyarakat sendiri. Untuk membangun suatu objek wisata diperlukan analisis pasar untuk memperkirakan aliran wisatawan yang datang dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber wisatawan pada sektor tersebut dibandingkan dengan persaingan dalam kerangka kebutuhan wisatawan sekarang dan yang akan datang. Disamping itu juga diperlukan inventarisasi atraksi wisata sebagai upaya meningkatkan pendapatan. Salah satu cara pendekatan yang dapat dilakukan adalah membedakan antara atraksi inti dan pembantu. Atraksi inti memberi ciri daerah itu,





yang mendasari alasan wisatawan untuk berkunjung. Bentuknya dapat membentuk atraksi alam seperti air terjun atau pantai. Atraksi pembantu adalah semua yang dibangun mengelilingi atraksi inti, misalnya untuk menuju air terjun ada atraksi menjelajah hutan, di wisata pantai ada aktivitas selancar dan fasilitas berenang.

Inventarisasi serupa dapat dilakukan pada fasilitas wisatawan seperti penginapan, restoran, dan toko pengecer aneka souvenir yang diperlukan wisatawan. Termasuk pula dalam hal ini transportasi ke dari, dan dalam tempat tujuan itu sendiri. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengunjung yang telah ada maka dapat mengidentifikasi segmen pasar yang dituju. Hal ini akan mempermudah menetapkan strategi memosisikan yang akan dibuat. Berikut disajikan sumber objek wisata (atraksi wisata) menurut Edward Inskeep (Pendit, 2006) dalam M. Iqbal S. Suhaeb, 2008.



Sumber: Edward Inskeep dalam Marpaung (2002)

Fandeli (Pendit, 2006) mengemukakan bahwa atraksi wisata alam di Indonesia dibedakan atas pegunungan, dataran tinggi, sungai, air terjun, danau, pemandangan (panorama), laut, pantai, pulau, mata air panas. Binatang, tumbuhan, lembah, kawah, goa, tanjung, dan cagar alam. Selanjutnya dikemukakan bahwa kegiatan berwisata pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup manusia, kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, baik psikologis maupun fisik.

Berwisata merupakan bentuk pemanfaatan waktu senggang secara menyenangkan disamakan dengan kegiatan bermain dan merupakan kebutuhan mendasar dan bagian kehidupan seseorang. Bila seseorang tidak berwisata biasanya karena belum terpenuhinya berbagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan ini. Bila persyaratan (waktu dan uang) telah tersedia maka suatu saat pasti orang tersebut akan mengadakan perjalanan wisata. Pariwisata dapat pula dilihat dari sudut pandang bentuknya, yakni seperti: (a). Menurut asal wisatawan. Perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau

asalanya dari dalam negeri, maka berarti wisatawan hanya pindah tempat sementara didalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan, disebut wisatawan domestik, sedangkan kalau ia datang dari luar negeri disebut wisatawan mancanegara, (b). Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran. Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti member dampak positif terhadap pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya yang ini disebut pariwisata aktif, sedangkan kepergian seorang warga negara keluar negeri dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (kualitatif-dekskripsi). Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan aktivitas sosial, persepsi, pemikiran orang secara individual dan kelompok. Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan para informan atau partisipannya dengan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, seperti alat perekam suara dan kamera.

Metode penentuan responden aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat lokal yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penentuan sampel dengan metode *purposive sampling* merupakan penentuan sampel atas dasar pertimbangan pribadi peneliti (Danim, 2004). Pertimbangan dalam penentuan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan, biaya, tenaga ataupun waktu. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 55 orang yang terdiri dari 30 orang pegawai Dinas Pariwisata dan 25 orang responden masyarakat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Tokoh masyarakat disekitar objek wisata.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu melalui wawancara, observasi dan kuisisioner serta studi literatur. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi/keterangan yang diperlukan, dalam penelitian ini ada dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan responden

maupun informan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disusun sesuai tujuan penelitian, serta pengamatan langsung (observasi) untuk melengkapi data primer yang diperlukan. Data primer yang diambil meliputi identitas/karakteristik responden, yakni: umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jarak tempat tinggal dan lama tinggal serta tanggapan responden terhadap kuisisioner sikap dan partisipasi. Data sekunder merupakan data penunjang bagi kegiatan penelitian yang dilakukan meliputi kondisi umum Kabupaten Bone.

Lembar kuisisioner yang telah terkumpul kemudian diberi kode untuk memudahkan kegiatan pengolahan data. Setelah diberikan kode, data-data dalam lembar kuisisioner selanjutnya diolah. Pengolahan data dilakukan dalam bentuk penyajian secara deskriptif dan uji non parametrik. Penyajian secara deskriptif digunakan untuk menjelaskan tanggapan yang diberikan berdasarkan nilai persentase jumlah responden. Nilai persentase tersebut diperoleh dengan cara membagi jumlah responden berdasarkan tanggapannya dengan jumlah keseluruhan responden. Untuk mengetahui tingkat sikap dan partisipasi responden, tanggapan yang diberikan selanjutnya diberikan nilai (*score*). Penentuan nilai untuk setiap tanggapan dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Masing-masing tanggapan (sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju) secara berturut bernilai 5,4,3,2, dan 1 (Singarimbun dan Effendi 1995). Tingkat sikap dan partisipasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni kategori tinggi ( $X < x - \frac{1}{2}Sd$ ), kategori sedang ( $x - \frac{1}{2}Sd < X < x + \frac{1}{2}Sd$ ) dan kategori tinggi ( $X > x + \frac{1}{2}Sd$ ). Karakteristik responden terdiri dari karakteristik internal dan karakteristik eksternal. Karakteristik internal terdiri dari pendidikan, jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan pendapatan, sedangkan untuk karakteristik eksternal terdiri atas jarak tempat tinggal dan lama tinggal. Pendidikan, umur, pendapatan, jarak tempat tinggal dan lama tinggal dikelompokkan menjadi tiga kategori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata kabupaten Bone, Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas keseharian

bukan merupakan hal yang terpisah antara berbagai aktivitas. Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang saling terkait baik itu untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun sosial. Dalam konteks pengelolaan hutan, aktivitas masyarakat yang diwujudkan dalam aktivitas domestik dan publik sesungguhnya adalah bentuk praksis dari pengelolaan hutan itu sendiri. Aktivitas yang dikaji meliputi: (1). Aktivitas dalam organisasi kelembagaan atau kelompok perkumpulan masyarakat, (2). Aktivitas dalam pertemuan kelompok perkumpulan warga, (3). Peran serta dalam forum pertemuan, (4). Aktivitas dalam kegiatan sosial masyarakat, (5). Aktivitas dalam mengajak warga untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan social, (6). Aktivitas dalam pengelolaan hutan, (7). Aktivitas dalam kegiatan pengamanan wilayah dan (8). Aktivitas keagamaan

Prosentase keterlibatan dan aktivitas mereka dalam organisasi/kelompok-kelompok masyarakat sebesar 100%, pertemuan kelompok sebesar 68,57%, semangat kerjasama dan gotong-royong untuk mengerjakan sesuatu masing-masing sebesar 97%, pengamanan wilayah pemukiman dan hutan 80%. Partisipasi ide, merupakan bentuk keterlibatan yang mengarah pada perumusan, perancangan dan perencanaan kegiatan. Dalam proses pembangunan, partisipasi ide berada pada fase-fase awal. Partisipasi tenaga, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara fisik dalam aktivitas sosial. Bentuk partisipasi semacam ini mudah teridentifikasi. Bahkan dalam konteks pembangunan partisipatoris semu, bentuk partisipasi tenaga lah yang lebih diakui. Kedua bentuk partisipasi tersebut dalam pelaksanaannya terwujud dalam aktivitas individual dan komunal. Aktivitas yang dilakukan secara komunal sendiri, dapat dikategorikan menjadi partisipasi yang terorganisasikan dan partisipasi yang tidak terorganisasikan.

Adapun peran serta masyarakat di Kabupaten Bone, meliputi:

#### a. Peran Pemerintah

- Melakukan justifikasi dan pembinaan berkelanjutan sebagai dukungan opini/pandangan yang sinergi antara stakeholder, media massa, lembaga sosial masyarakat, Instansi terkait, wakil rakyat dan pemerintah daerah sebagai mediator.

- Memberikan pemahaman, bahwa pariwisata bukan saja sebagai kegiatan lintas sektoral tetapi juga sebagai kegiatan lintas usaha
- b. Pengusaha, meliputi
  - Harapan masyarakat terhadap pengembangan SDM Kepariwisata di Kabupaten Bone
  - Langkah penyebaran informasi kepariwisataan ke depan
  - Sebagai jaminan masa depan yang relevan
  - Langkah awal penanaman modal
  - Peningkatan unit-unit simpan pinjam dalam rangka pengelolaan objek
- c. Peran masyarakat:
  - Harapan masyarakat terhadap pengembangan SDM Kepariwisata di Kabupaten Bone
  - Langkah edukatif sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan terhadap masyarakat
- d. Peran wisatawan, meliputi:
  - sejauhmana kelayakan objek wisata bagi wisatawan
  - melibatkan wisatawan dalam mendukung pengembangan berkelanjutan.

### Pengembangan pariwisata kabupaten Bone sebagai destinasi unggulan

Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang dirperinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) desa dan 39 (tiga puluh sembilan) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu). Wilayah Kecamatan **Bontocani** terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kahu** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kajuara** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Salomekko** terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tonra** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Patimpeng** terdiri dari 10 desa. Kecamatan **Libureng** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Mare** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Sibulue** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Cina** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Barebbo** terdiri dari 18 desa. Kecamatan **Ponre** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lappariaja** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lamuru** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu Limpoe** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Bengo** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Ulaweng** terdiri dari 14 desa dan 1

kelurahan. Kecamatan **Palakka** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Awangpone** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu Siattinge** terdiri dari 15 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan **Amali** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Ajangale** terdiri dari 14 desa. Kecamatan **Dua Boccoe** terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Cenrana** terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang Barat** terdiri dari 8 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang** terdiri dari 8 kelurahan. Serta Kecamatan **Tanete Riattang Timur** terdiri dari 8 kelurahan juga.

Lambang Daerah Kabupaten Bone berbentuk perisai bersudut lima dengan dasar warna hijau kebiru-biruan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu: Sisir (Salaga), Jangkar, Timbangan, Keris Terhunus, Kapas dan dibawahnya bertuliskan Kabupaten Bone. Kesemuanya menggambarkan tata kehidupan yang khas serta mengandung unsur-unsur historis, kultural, patriotik, sosiologis ekonomis dan agraris terutama yang melambangkan kepribadian. (a). (Sisir Salaga) melambangkan bahwa salah satu dasar penghidupan penghasilan rakyat daerah Bone bersumber pada pertanian untuk mencapai kehidupan yang layak. Cara menggunakan alat pertanian tersebut dengan sistem gotong royong memberikan kesan bahwa sarana penghidupan dan kehidupan rakyat bone berdasarkan atas sistem gotong royong, (b). Jangkar melambangkan sifat kebaharian yang perkasa dari rakyat Bone seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah Perahu Elung Mangenre milik kerajaan Bone dengan Bendera Samparajae sebagai lambang kebesaran kerajaan didalamnya terlukis gambar Jangkar, sehingga dapat ditarik kesan bahwa sifat pelaut ini merupakan khas daripada penduduk Bone, (c). Timbangan pada tangkai lukisan jangkar sebelah menyebelah menandakan bahwa Rakyat Bone dengan segala tindakan dan perbuatan serta pikiran dan pertimbangan yang waras. Timbangan inipun melambangkan keadilan dan kejujuran yang selalu merupakan pegangan dalam bertindak, (d). Keris terhunus melambangkan keberanian. Hal ini memberikan kesan bahwa rakyat Bone laksana prajurit yang gagah perkasa dalam membela kebenaran dan keadilan. Keris terhunus melambangkan kesiapsiagaan rakyat dalam segala hal, (e). Padi adalah pangan dan makanan pokok dari rakyat Bone. Ini berarti bahwa daerah bone adalah daerah agraris, (f). Kapas adalah

melambungkan sandang yang juga merupakan cita-cita perjuangan rakyat dalam memenuhi kebutuhan primernya dan (g). Tulisan 'Kabupaten Bone' sebagai manifestasi perwujudan nama daerah Bone. Tulisan ini berwarna merah yang melambungkan keberanian dalam mempertahankan kebenaran serta dalam segala cita rasa dan karsanya tetap suci.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'-5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 260C – 430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Ratarata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata <1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm. Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti Sungai Walanae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Sungai Lekoballo. Dari hasil observasi dan tinjauan literature yang ada, terdapat beberapa sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Museum Lapawawoi Karaeng Sigeri**

Museum Lapawawoi merupakan bangunan tempat tinggal Raja Bone XXXII Andi Mappanyukki, bangunan ini berfungsi sebagai tempat pusat aktifitas pemerintahan dan perjuangan membela kemerdekaan Republik Indonesia yang beralokasi di Pusat Watampone.

#### **b. Bola Soba**

Saoraja Petta PonggawaE atau dikenal adalah rumah adat tempat tinggal Panglima Perang Kerajaan Bone "Andi Abdul Hamid Baso Pangilingi Petta PonggawaE dimasa pemerintahan Raja Bone XXXI Lapawawoi Karaeng Sigeri. Setelah Kerajaan Bone dibawah kekuasaan Belanda, rumah ini dijadikan sebagai penginapan para tamu (sahabat) dan kalangan penguasa ketika itu yang beralkasi di pusat Kota Watampone.

#### **c. Bola Subbie**

Bangunan ini merupakan rumah tempat tinggal To Marilaleng, yaitu Kepala adat Tujuh yang mempunyai tugas sebagai penyambung aspirasi keputusan adat tujuh kepada Mangkau (Raja), begitupula sebaliknya. Rumah ini diukir dengan corak ukiran khas bone, dalam masa-masa selanjutnya dikenal dengan sebutan Bola Subbie yang menurut sejarahnya pernah dikunjungi pertama kali oleh Presiden Pertama RI untuk bersilaturahmi dengan rakyat Bone, yakni pada masa setelah terjadi penyerahan kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949 yang beralokasi di Pusat Kota Watampone.

#### **d. Rumah Jabatan Bupati**

Pada abad XIX bangunan ini merupakan Istana Raja Bone setelah kemerdekaan RI tercapai, kemudia tempat ini dijadikan rumah jabatan Bupati sejak Bupati Bone pertama hingga Bupati one sekarang yang beralokasi dipusat Kota Wtampone.

#### **e. Museum Arajang**

Bangunannya terdapat dibagian kanan rumah jabatan rumah jabatan Bupati Bone merupakan tempat penyimpanan benda-benda pusaka Kerajaan Bone yang terdiri dari: (1). Payung Pulaweng, dimana pusaka ini terbuat dari emas sebagai tanda persaudaraan dari Raja Pariaman kepada raja Bone XV Latenri Tatta Arung Palakka, (2). Keris Lamakkawa, dimana pusaka ini merupakan pusaka kerajaan pada abad XVI ketika itu rajanya adalah Raja Bone XV Arung Palakka digunakan sebagai salah satu senjata dalam menghadapi setiap peperangan, (3). Pedang (Alameng) Latea Ri Duni Merupakan pusaka pada masa kerajaan Arung Palakka pada abad XVI yang sering digunakan dalam menghadapi perang dan (4). Salempang



Kerajaan (Sempang Pulaweng) pusaka ini merupakan Salempang Emas yang memperlihatkan seuntai padi menunjukkan pertanda jiwa Sang Raja akan selalu bersatu dengan rakyatnya. Salempang pusaka ini dipakaikan dalam setiap pelantikan Raja-Raja Bone.

Keempat pusaka ini, merupakan syarat perlengkapan utama dalam setiap pelantikan Raja-raja di tanah Bone sebagaimana dijelaskan dalam Lontara “Na Iya Tanranna MangkauE Ri Bone, Iyana Ritu Tappiengngi Lamakkawa, Nappaduangi Latea Ri Duni, Nakketeningi Lasalaga, Mappangara Ri Lacaloko, Nappajungi Pajung PulawengE”, yang berarti adapaun yang menjadi tanda Mangkau (Raja) ialah yang memakai Lamakkawa dan Latea Ri Duni, bertongkat dengan tombak La Salaga, megambil sawah La Caloko erta dipayungi payung Emas. Beberapa penginggalan emas pusaka kerajaan Bone yang tersimpan di museum ArajangE adalah tombak dan “Petta MakkaccaE” (Potongn Rambut Arung Palakka)”.

#### f. Situs Manurunge ri Matajang

Bangunan ini menunjukkan tempat berwalnya bentuk pemimpin kerajan dengn kedudukan sebagai Mangkau (Raja) Pertama di tanah Bone pada abad XIII Tahun 1330. Penunjukan dan penetapan sebagai Mangkau (Raja) bukan atas dasar keturunan tetapi melalui suatu peristiwa. Peristiwa pertama dimana kehidupan masyarakat dalam peristiwa tidak menentu baik arah dan tujuannya, sehingga diperlukan seorang yang mampu menata kembali kehidupan yang serba carut marut. Dalam keadaan demikian muncullah perisiwa kedua yakni kemunculan seseorang yang kehadirannya dianggap titisan dri langit (To Manurung) dan menampakkan ssok pribadi yang memiliki kepribadian yang tinggi, beribawa, mempunyai kecerdasan, keberanian, dan jiwa kepemimpinan yang muMpuni (Matta SilompoE), sehingga atas kehendak, keinginan dan keyakinan masyarakat ditunjukklah Ia sebagai Seorang Mangkau (Raja) melalui sebuah bentuk konteks perjanjian antara To Manurung dengan rakyat banyak yang iwakili oleh masing-masing kepala perwakilan (Matoa), bunyi perjanjian ketiga itu ialaha:

*“Angikko kiraukkaju riako mangiri,  
riakkeng mutappaling elo’mu rikkeng  
adammukuwa. Mattapamko kilao,  
molliko kisawe, mellauko kiyabbere,*

*maumi ana napattarommeng, rekkua  
muteaiwi, ritetoi naekkia dongirikkeng  
temmatippang, muampirikeng  
temmakare, musallipurekkeng  
temmadinging”*

Artinya:

Engkaulah angin dan kami daun kayu, kemana engkau berhembus kesitu kami menurut, kemauan dan kehendakmu yang berlaku atas kami. Apabila engkau memanggil kami menahut, engkau mengundang kami datang dan apabila engkau meminta kami member, walaupun anak dan isteri kami jika tuanku tidak senang maka kamipun tidak menyenangi, tetapi engkau menjaga kami agar aman dan tenteram, engkau melindungi kami agar makmur, sejahtera dan engkau melindungi kami agar tidak menderta.

#### g. Situs tanah Bangkalae

Merupakan hasil penyatuan dan pencampuran ketiga tanah yang secara adat didatangkan dari tiga kerajaan Besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Bone, Luwu dan Gowa. Hasil pencampuran ketiga tanah tersebut terjadilah perubahan warna dar masing-masing warna aslinya sehingga disebut tanah BangkalaE yang dijadikan tempat pelantikan/penobatan Raja Boe (Mangkau) secara turun temurun dilantik oleh Dewan Adat (Adat Tujuh). Ketiga tanah tersebut sebagai tanah Ritappa Dewata yag bermakna pertanda kesepakatan untk menciptakan perdamaian, kerjasama dan persatuan dimana kerajaan Bone sebagai pusat kerajaan. Situs ini terletak di pusat Kota Watampone.

#### h. Kompleks makam KalokkoE

Bangunan makam Raja Bone XIII La Maddaremmeng MatinroE ri Bukaka dikenal sebagai raja yang sangat taat melaksanakan syariat Islam serta beliau menciptakan Payung Kerajaan. Dan tampak juga bangunan Makam Raja Bone XVII Bataritoja MatinroE ri TippuluE. Lokasi kompleks KELurahan Bukaka sekitar satu kilometer dari pusat Kota Watampone.

#### i. Komplek Makam Petta PongawaE

Bangunan makam Abdul Hamid Baso Pangilingi Petta PonggawaE adalah putra raja Bone XXXI Lapawawoi Karaeng Sigeri dan merupakan Panglima Perang Kerajaan Bone yang gugur melawan BElanda pada tahun 1895-1905. Lokasi makam terletak di Desa Matuju Kecamatan Awangpone 18 Kilometer dari Kota Watampone.

#### j. Makam Lapatu Matanna Tikka

Makam Raja Bone XVI Tahun 1696-1714, La



Patau Matanna Tikka MatinroE Ri Nagauleng merupakan putera dari hasil pernikahan We Mappolombombang dan juga merupakan saudara kandung La Tenri Tatta (Arung Palakka) dengan Lapappokoi Arung Timurung (turunan Raja Bone XIII LA Maddaremmeng MatinroE Ri Bukaka yang beralokasi di Desa Nagauleng Kecamatan Cenrana kuang lebih 46 Kilo meter dari kota Watampone.

#### **k. Tugu Allamung Patue**

Tugu Allamung Patue merupakan tanda kesepakatan tiga kerajaan, yaitu : Kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng yang inti kesepakatan adalah saling mendukung apabila salah satu diantaranya kena musibah. Lokasi ini terletak di Desa Telle KEcamatan Ajangale kurang lebih 65 Kilo meter dari Kota Watampone.

#### **l. Makam Raja-raja Watang Lamuru**

Raja-raja yang dimakamkan ditempat ini adalah para Arung Lamuru yaitu We Tenri Baji (Datu Lamuru), We Tenri Bili (Datu LAmuru II, Ipammari (Datu Lamuru XI), yang memerintah kerajaan dibawah naungan panji Kerajaan Bone. Di tempat ini dimakamkan Colli PujiE (Datu Lamuru IX) yang pernah diusulkan sebagai pahlawan nasional bidang penulisan sastra Laga Ligo pada tahun 2003. Lokasi ini terletak di Kecamatan Lamuru kurang lebih 72 Kilometer dari Kota Watampone.

#### **m. Makam Arung Palakka**

Makam La Tenri Tatta Toappa Tunru Petta Malampe Gemme'na Daeng Sultan Saaduddin Arung Palakka Matinroe Ri Bontoala merupakan raja Bone XV putera dari Lapapopoi Arung Tanah Tenggara dengan We Tenri Ruwa matinroe ri Bantaeng dan ia mempristrikan La Domai I Mangkawani (Turunan Bangsawan Gowa). Dalam masa pemerintahannya tahun 1667-1696 ia berhasil mengaliri kehidupan dan kerjasama antar kerajan Sulawesi melalui hasil tali temali perkawinan maupun kerajaan lain seperti kerajaan Ternate, Buton di Pariaan. Lokasi makam ini terletak di Bontoala Kabupaten Gowa kurang lebih 185 Kilometer dari kota Watamone.

#### **n. Tanjung Palette**

Kawasan objek wisata Tanjung Palette dapat dijumpai sejumlah sarana rekreasi untuk hiburan umum. Sarana olahraga seperti kolam permandian, lapangan tenis, sarana rekreasi memancing, bangunan penginapan dan sarana wisata bahari lainnya. Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dimasa depan telah direncanakan

sejumlah fasilitas yang merupakan pengembangan dan mendukung pariwisata daerah kabupaten Bone. Lokasi ini terletak kurang lebih 12 kilometer dari kota Watampone.

#### **o. Gua Janci (Tapak kaki Arung Palakka)**

Gua ini dikisahkan bahwa La Tenri Tatta Arung Palakka pernah berucap sumpah dan janji akan mengembalikan citra Kerajaan Bone dan mempersatukan Kerajaan Bugis. Selain itu terdapat pula telaak kaki La Tenri Tatta Arung Palakka sebagai bentuk sumpahnya terletak dipinggir pantai kapur kertas yang curang dan tajam yang tidak terpisahkan dari kawasan wisata Ujung Palette. Lokasi ini terletak di Desa Mallari Kecamatan Awangpone kung lebih 14 kilometer dari Kota Watampone

#### **p. Gua Mampu**

Dala gua Mampu dikenal akan kendahan panoramanya, terdapat sejumlah rupa bebatuan stalaktid dan stalakmid, juga dikenal legenda kutukan mampu dengan sebutan Alebborena o Mampu. Dimana akibat kutukan ini penduduk dan hewan yang berada dalam wilayah kerajan Mampu seluruhnya menjadi batu yang menyerupai mahluk-mahluk hidup dalam gua. Lokasi ini terletak di Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe sekitar 45 Kilometer dari Kota Watampone.

#### **q. Permandian Waetuo**

Ditempat ini memiliki 3 (tiga) kolam permandian masing-masing untuk anak-anak dan dewasa merupakan kolam permandian alam dengan sumber mata air. Lokasi ini terletak sekitar 97 kilometer dari Kota Watampone.

#### **r. Permandian alam Taretta**

Permandian alam Taretta terdapat tiga bak kolam renang masing-masng untuk kolam anak-anak dan dewasa. Ditempat ini merupakan kolam air dengan sumber air dari mata air Waemputtangnge. Lokasi ini terletak di Desa Taretta KEcamatan Amali sekita 75 Kilometer dari Kota Watampone.

#### **s. Permandian Alinge**

Dikawasan ini terdapat 2 (dua) kolam renang masinh-masing untuk anak-anak dan dewasa merupakan kolam permandian alam dengan sumber mata air. Lokasi ini terletak di Desa Alinge KEcamatan Ulaweng sekita 80 Kilometer dari Kota Watampone.

#### **t. Pantai Ujung Pattiro (Cappa Ujung)**

Di kawasan ini para wisatawan dapat menikmati panorama pantai, terbenamnya matahari juga merupakan kawasan wisata bahari, agrowisata, dan pada pesisir pantai memiliki fasilitas dermaga

kapal nelayan serta pada musim tertentu wisatawan dapat menikmati berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, langsung, dan durian. Lokasi ini terletak sekitar 23 kilometer dari Kota Watampone.

**u. Pantai Pasir Putih Gareccing (Pantai Tete)**

Kawasan ini sebagai tempat wisata bahari yang merupakan kawasan wisata pantai pasir putih. Pada waktu tertentu difungsikan sebagai kawasan pelatihan tempur TNI wilayah territorial Korem 141 Toddouli Wirabuana Kabupaten Bone. Lokasi ini terletak di Kecamatan Tonra sekitar 67 kilometer dari kota Watampone.

**v. Bendungan Salomekko**

Objek wisata bendungan Salomekko memiliki panorama alam yang indah dikelilingi pegunungan. Kawasan wisata ini tersedia fasilitas rekreasi berupa olahraga, ski, dan speed boat. Tempat rekreasi memancing perkemahan wisata juga dapat dijadikan lomba perahu tradisional. Lokasi ini terletak di Kecamatan Salomekko sekitar 56 kilometer dari Kota Watampone.

**w. Air terjun Bontocani (Air terjun Pammusureng)**

Air terjun Bontocani memiliki panorama alam yang indah dan disekitarnya terdapat perkebunan cengkeh dan sejumlah pepohonan jati dan kapas. Merupakan air terjun bertingkat tujuh dan memiliki air jernih dan sangat ideal sebagai tujuan wisata petualangan, olahraga dan panjat tebing. Lokasi ini terletak 107 kilometer dari kota Watampone.

**x. Air terjun Baruttungge**

Air terjun Baruttungge merupakan air terjun dua tingkat berada dalam kawasan hutan wisata yang berisikan panorama dan keindahan alam tanaman jati dan sejumlah jenis kera berbulu warna emas. Lokasi ini terletak di Kecamatan Ulaweng kabupaten Bone.

**y. Sumpang Labbu**

Terowongan Sumpang Labbu merupakan salah satu pintu gerbang masuk ke Kota Watampone arah dari Makassar Bone. Sumpang Labbu juga merupakan objek wisata panorama alam berupa terowongan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda (VOC).

Adapun asset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

**1. Permainan Rakyat si Julu Sulo**

Tradisi dilakukan di Desa Pongka Kecamatan Tellu Siattingge. Si Julu Sulo merupakan ritual adat untuk mengenang nenek moyang menandakan rasa gembira dan bersyukur kepada sang pencipta

dengan saling membakar diri dan berperang api.

**2. Maggiri**

Seni peragaan kekebalan tubuh (Maggiri) dilakukan oleh Bissu dengan menusuk diri menggunakan sebilah keris. Bissu merupakan abdi Raja, bertugas menyelenggarakan ritual untuk arajang.

**3. Kirab Laskar Kerajaan Bone**

Dalam proses adat ini digelar sejumlah jenis dan susunan pasukan kerajaan Bone dimasa lampau yang terdiri dari pasukan Petta PonggawaE, pasukan lascar, pasukan Ade' Pitu (tujuh petinggi adat kerajaan), pasukan Bangsawan Kerajaan serta pasukan tokoh-tokoh masyarakat.

**4. Mattompang Arajang**

Merupakan pencucian benda-benda pusaka Kerajaan Bone yang terdiri dari Keris Lamakkawa, Pedang (Alameng La Tea Riduni) dan Salempang Emas (Salempang pulaweng) serta senjata perang lainnya dengan pelaksana oleh Empu Keris Pusaka lainnya dengan pelaksana oleh Empu Keris Pusaka yang disertai dengan ta Sumange, Ana' Beccing, dan Kancing. Tata cara adat meliputi Sere Bissu yang diiringi music Genrang Bali Sumange, ana' ecing dan Kancing. Benda-benda pusaka tersebut diadakan penyucian secara adat di Bulan April pada peringatan Hari jadi Bone.

**5. Tari Pajoge**

Adalah sebuah tarian yang lahir dan sangat digemari di masa dan Raja Bone ke XXXI La PAwawoi Karaeng Sigeri. Tarian ini dipelihara dan dilestarikan sebagai tarian hiburan untuk menghibur masyarakat dengan gerakan yang lemah gemulai serta pakaian yang berkilau dapat menarik simpati para penonton yang terhormat, biasanya didatangi oleh penari-penari untuk "Ballung" (merebahkan badan) dan secepatnya yang terhormat memberikan cendramata kepada penari pajoge tersebut.

**6. Tari Maraneng Songko Pamiring**

Tari Songko Pamiring Pulaweng diperagakan oleh Ana'dara dan Kallolona To Bone di depan tamu kehormatan daerah. Tarian ini merupakan tari kreasi daerah yang menggambarkan bagaimana mengayam songko To Bone sambil bergembira ria, mulai dari pengambilan

bahan serat pohon enau atau poho lontar (Urek ca) sampai menjadi songko. Alat music tradisional yang digunakan terdiri gendang, Gong, Kecapi, Suling dan peralatan lainnya.

#### 7. **Tari Alusu**

Pada awalnya tarian ini diperagakan oleh para Bissu kerajaan pada masa pemerintahan Raja Bone X We Tenri Tuppu MatinroE ri Sidenreng dengan sebutan Sere Bissu dan pada masa berikutnya diperagakan oleh para Dara-dara dilingkungan Bangsawan yang digelar untuk penjemputan tamu kehormatan dari kerajaan lainnya.

#### 8. **Tari Pajaga Andi**

Lahir pada masa Raja Bone We Benri Gau (Fatimah Bandri) juga selaku pencipta pakaian “Waju Ponco” yang dikenakan bagi para Andi-Andi seperti sekarang ini. Tarian ini diperagakan pada saat majjaga di Saoraja untuk menciptakan suasana hiburan bagi Raja ketika sedang beristirahat di Saoraja.

#### 9. **Tari Pajaga Welado**

Tarian ini menggambarkan bagaimana menjaga keamanan Istana Raja sambil menghibur diri pada saat Majjaga (menjaga). Tarian ini masih dipelihara di Desa Welado Kec. Dua BoccoE.

#### 10. **Genrang Sanro**

Acara ini dipakai dalam upacara adat seperti acara Menre Bola (Menempati Rumah Baru). Mappakulawi (selamatan anak baru lahir) dilakukan para sanro (Dukun). Alat ini digunakan adalah gendang, Ana Beccing, Kancing, Mangkok porselin dan Sinto (dari bahan daun lontar).

#### 11. **Genrang Bajo**

Memberikan gambaran situasi kehidupan suku Bajo dipesisir pantai oleh para komunitas suku Bajo dan biasa disebut Genrang Pabbiring (Pesisir)

#### 12. **Genrang Bali Sumange**

Dilaksanakan untuk mengiringi upacara perkawinan adat, seperti pada acara adat perkawinan antar rumpun bangsawan mulai dari Mapettu ada, tudang penni sampai hari perkawinan dilingkungan Saoraja diiringi dengan Anak Beccing dan Kancing.

#### 13. **Opera Bugis Tomalaweng Ritanjung Palette**

Opera Bugis Tomalaweng ri Tanjung Palette, dua orang yang melakukan perbuatan makasiat yang masih memiliki hubungan dekat seperti saudara kandung, mereka ketahun oleh adat, sehingga dikenakan hukuman dengan cara diladong atau ditenggelamkan di laut sebelah timur Tanjung palltette.

Kerajinan tangan sebagai asset budaya kabupaten Bone diantaranya adalah:

##### 1. **Kerajina tangan anemi**

Merupakan salah satu kerajinan cinderamata khas bone yang bahan dasarnya dari daun lontar yang dipintal menjadi pita. Hasil kerajinan anemi ini berupa bosara, atau tempat kue, tempat tissue, penutupan gelas dan lain-lain yang sentral (pusat) pengrajinnya berada di kecamatan Barebbo.

##### 2. **Kerjina tangan Songko To Bone (Songko Pamiring Pulaweng)**

Songko To Bone dikenal dengan sebutan Songko pamiring Pulaweng yang digunakan pada acara-acara adat merupakan Songko khas Bone yang terbuat dari bahan Lontar dan emas dibintal menjadi benang. Pada masa pemerintahan kerajaan Bone tingkat kasta masyarakat bone dapat dilihat dari ketebalan pamiring pulaweng atau benang emas yang sentral (pusat) pengrajinnya berada di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

##### 3. **Kerjina Tenun Sutera**

Kerjina ini termasuk kerajinan khas bugis yang memiliki corak beraenka ragam yang mempunyai arti dan pesan dengan menggunakan peralatan tradisionaldengan membutuhkan waktu yang cukup lama serta ketenangan, kesabaran, ketelitian dan ketekunan.

##### 4. **Kerajinan perak dan kuningan**

Merupakan produksi home industry yang sudah banyak diekspor ke mancanegara sebagai cenderamata (souvenir) dan juga sebagai asesoris pakaian adat bugis yang bertempat di Desa Pompanua Kecamatan AjangalaE Kabupaten Bone.



## KESIMPULAN

Optimalisasi pemanfaatan kedudukan Kabupaten Bone merupakan salah satu bagian pusat pengembangan ekonomi Sulawesi Selatan dan merupakan wilayah potensial serta strategis untuk mendorong perkembangan sector pariwisata. Dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah pada pengembangan sector pariwisata, selain oleh faktor letak strategisnya, pengembangan sector kepariwisataan Kabupaten Bone juga didukung oleh kondisi alamnya yang terdiri atas hamparan darat, laut dan perbukitan, dilihat dari karakteristik masyarakatnya, Kabupaten Bone juga memiliki keanekaragaman kekentalan budaya yang variatif yang didukung dengan apresiasi positif komunitas masyarakat dan sekaligus dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kerajaan besar di Sulawesi Selatan, serta luas wilayahnya yang mencapai 27 kecamatan.

Mengacu pada besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bone yang mempunyai prospek dan peluang untuk pengembangan sektor pariwisata di daerah ini, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk dapat dieksploitasi secara positif guna memaksimalkan obyek-obyek wisata potensial dengan harapan dapat memberi kontribusi terhadap masyarakat dan pemerintah. Agar hal tersebut dapat direalisasikan, maka dibutuhkan suatu upaya-upaya yang efektif untuk memperkenalkan dan mempublikasikan seluruh obyek-obyek wisata potensial yang terdapat di daerah ini secara bertahap dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Butler, Pearce, 1999. *Contemporary Issues in Tourism Development*. Routledge, London.
- Damanik Janianton dan Weber Helmut F, 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Andy Offset, Yogyakarta.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah RIPPDA*, Kabupaten Selayar Tahun 2008
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, *Rencana Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Tanakeke*, Kabupaten Takalar, Tahun 2008
- Echols & Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, edisi XXVI. Penerbit Gramedia Jakarta
- Fandeli, Chafid. Januari 2002. *Perencanaan*

- Kepariwisata Alam*. Yogyakarta. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada
- Fandeli, Chafid dan Mukhlison, 2000 *Pengusahaan Ekowisata* Pustaka Pelajar Offset UGM Fak. Kehutanan Yogyakarta.
- Garrod Brian and Wilson, C Julie, 2005 *Aspect of Tourism : Marine Ekotourism* (Issues and experiences). Great Britain Cromwell Press London
- Irawan, Prasetya, 2005, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA-LAN Press..
- Mathew, Harry. 1978. *International Tourism*. Schenkman Publishing Company, Inc.
- Pitana, Gayatri, 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi Offset Yogyakarta.
- Suhaeb, M Iqbal, 2008. *Analisis pengaruh pengembangan pariwisata terhadap pengkatan kesejahteraan masyarakat pada destinasi pariwisata di Kota Makassar : kepulauan Spermonde*. Desertasi Program Pascasarjana UNHAS.
- UNWTO ( United Nation World Tourism Organization) 2006. *Tourism Highlights 2006 Edition*. WTO Madrid Spain [http://www.unwto.org/highlights\\_06\\_eng\\_pdf](http://www.unwto.org/highlights_06_eng_pdf) Download on May, 2009.
- Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Perundang-undangan dan peraturan lainnya :**
- DPR RI, Undang Undang RI NO 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025. Fokusmedia-Bandung
- DPR RI 2009, Undang-Undang Kepariwisata RI No 10 tahun 2009
- Presiden RI, 1996. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*
- PERATURAN BUPATI SELAYAR No 04 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2010